



IMPLEMENTASI PROGRAM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI PEDESAAN: STUDI KASUS DESA TOMPO, KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

Wahyul AZ
 ITBA Al Gazali Barru
 wahyul@algazali.ac.id
 Jumria
 ITBA Al Gazali Barru
 jumria@algazali.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan pangan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan melindungi masyarakat rentan dari risiko kerawanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, Kabupaten Barru, Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, ketua RT, serta penerima manfaat program. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPP berkontribusi dalam meningkatkan akses pangan bagi rumah tangga rentan dan membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga. Implementasi program didukung oleh koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait serta mekanisme musyawarah dalam penetapan penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidaktepatan data penerima, perubahan jumlah penerima manfaat, serta perlunya peningkatan komunikasi kepada masyarakat terkait mekanisme program. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan CPP tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan pangan, tetapi juga oleh akurasi data, efektivitas koordinasi kelembagaan, dan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan dan evaluasi program secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas CPP dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan.

Kata kunci: Cadangan Pangan Pemerintah, ketahanan pangan rumah tangga, implementasi kebijakan, pedesaan.

ABSTRACT

Household food security is a critical component of sustainable rural development. The Indonesian Government has implemented the Government Food Reserve Program (CPP) as a policy instrument to maintain food availability and protect vulnerable communities from food insecurity risks. This study aims to analyze the implementation of the Government Food Reserve Program in enhancing household food security in Tompo Village, Barru Regency, Indonesia. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving village officials, community leaders, and program beneficiaries. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the CPP contributes significantly to improving food access for vulnerable households and reducing household expenditure burdens. Program implementation is supported by coordination between village authorities and relevant agencies, as well as participatory deliberation mechanisms in determining beneficiaries. However, several challenges remain, including inaccuracies in beneficiary data, fluctuations in the number of recipients, and the need for improved communication regarding program procedures. The study highlights that the effectiveness of the CPP depends not only on food assistance availability but also on data accuracy, institutional coordination, and communication quality. Strengthening data management systems and conducting continuous program evaluations are therefore essential to enhance the effectiveness of the CPP in supporting rural household food security.

Keywords: Government Food Reserve Program, household food security, policy implementation, rural areas.



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu fundamental dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks rumah tangga pedesaan, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitasnya sepanjang waktu. FAO menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup empat pilar utama yaitu availability, access, utilization, dan stability yang harus terpenuhi secara simultan (FAO, 2021). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan masih rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat perubahan iklim, fluktuasi harga, dan keterbatasan produksi lokal (IPCC, 2022). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan cadangan pangan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan rumah tangga di pedesaan (HLPE, 2020).

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks rumah tangga pedesaan, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitasnya sepanjang waktu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan masih rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat perubahan iklim, fluktuasi harga, dan keterbatasan produksi lokal (Maxwell & Smith, 2019). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan cadangan pangan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan rumah tangga di pedesaan.

Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia masih bersifat multidimensional, terutama pada wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian tradisional. Rumah tangga petani sering menghadapi kondisi rawan pangan karena rendahnya pendapatan, terbatasnya akses pasar, serta ketidakpastian hasil produksi pertanian. Laporan FAO, IFAD, UNICEF, WFP, dan WHO menunjukkan bahwa kerawanan pangan global masih meningkat akibat ketimpangan ekonomi dan dampak perubahan iklim (FAO et al., 2023). Selain itu, rendahnya diversifikasi pendapatan rumah tangga pedesaan memperburuk kerentanan pangan (World Bank, 2022). Faktor pendidikan, pendapatan, dan aset rumah tangga juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan (Smith & Haddad, 2015). Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat daya tahan rumah tangga terhadap risiko pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan instrumen kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan daerah. Program ini berfungsi sebagai buffer stock untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun lonjakan harga pangan. FAO (2021) menjelaskan bahwa sistem cadangan pangan merupakan bagian penting dari food system resilience untuk mengurangi risiko gangguan pasokan. Di Indonesia, penguatan cadangan pangan daerah menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan (Badan Pangan Nasional, 2023). Selain itu, HLPE (2020) menekankan bahwa cadangan pangan yang dikelola dengan baik dapat mengurangi kerentanan pangan pada kelompok miskin dan rentan, terutama di wilayah pedesaan.

Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah di tingkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Program ini meliputi distribusi bantuan pangan, penguatan lumbung pangan masyarakat, serta stabilisasi harga bahan pokok. Namun, efektivitas implementasi sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor (Hill & Hupe, 2014). Dalam studi implementasi kebijakan, Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks kebijakan pangan, kelemahan pada aspek distribusi dan data sasaran masih menjadi masalah utama di banyak daerah (World Bank, 2022). Oleh karena itu, evaluasi implementasi program menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, serta pendapatan rumah tangga, sedangkan faktor eksternal mencakup ketersediaan pangan, akses pasar, dan kebijakan pemerintah. IPCC (2022) menyatakan bahwa perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian dan sistem pangan global. Selain itu, rumah tangga dengan pendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi terhadap kerawanan pangan (FAO, 2021). Dalam konteks pedesaan, ketergantungan pada sektor pertanian membuat rumah tangga sangat rentan terhadap fluktuasi hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.

Desa Tompo di Kecamatan Barru merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik ekonomi berbasis pertanian. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kerentanan terhadap ketahanan pangan rumah tangga, terutama pada musim paceklik. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), rumah tangga di wilayah pedesaan Indonesia masih memiliki tingkat kerawanan pangan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar memperburuk distribusi pangan lokal. Dalam situasi tersebut, Program Cadangan Pangan Pemerintah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pangan rumah tangga.

Meskipun Program Cadangan Pangan Pemerintah telah diterapkan di berbagai daerah, efektivitas implementasinya masih bervariasi. Studi Hill dan Hupe (2014) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kapasitas aktor pelaksana. Tantangan utama dalam program pangan adalah ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (World Bank, 2022). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat keberhasilan program (FAO, 2021). Oleh karena itu, kajian implementasi di tingkat desa menjadi penting untuk melihat efektivitas nyata kebijakan.

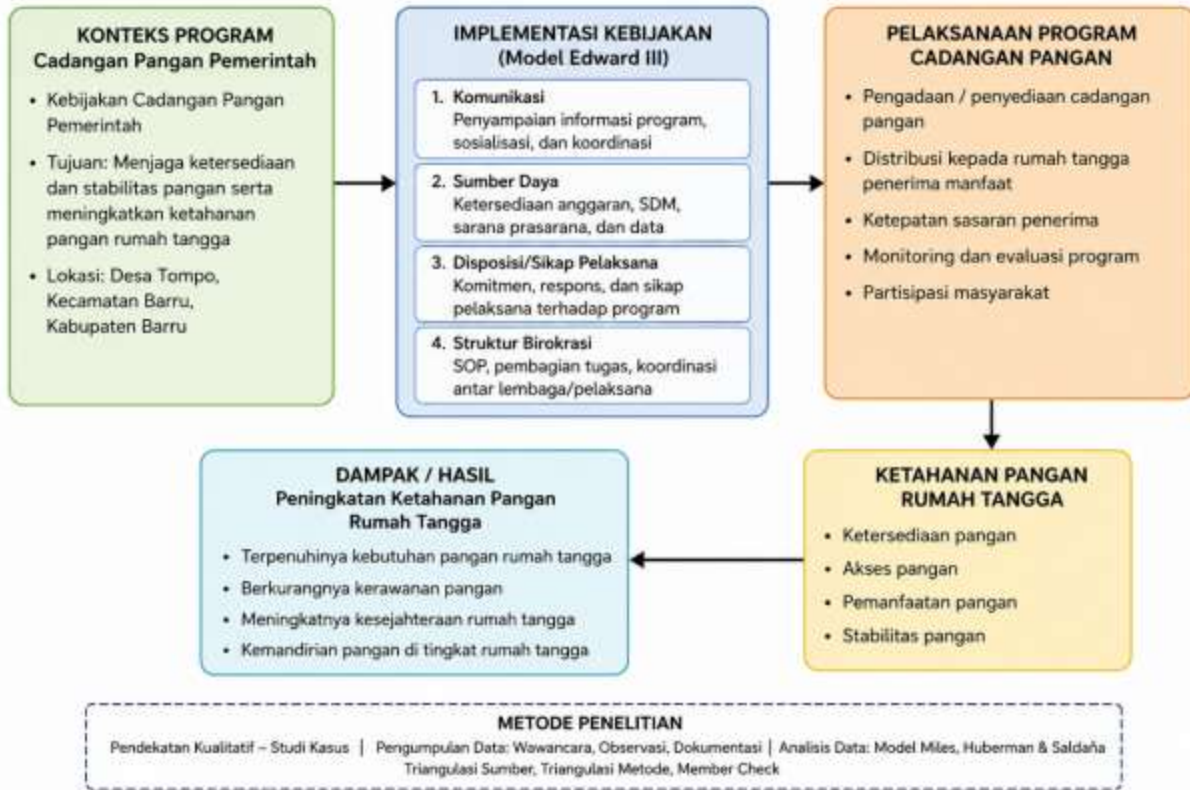
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Fokus penelitian mencakup proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap ketahanan pangan masyarakat. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu kebijakan publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program cadangan pangan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di tingkat lokal. Studi kasus digunakan untuk menggali secara komprehensif fenomena implementasi program dalam konteks sosial masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik khusus terkait akses dan ketersediaan pangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai dampak program terhadap kondisi ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat. Metode studi kasus banyak digunakan dalam penelitian ketahanan pangan karena mampu menjelaskan kondisi riil masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pangan di tingkat rumah tangga.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, penyuluh pertanian, pengelola program cadangan pangan, kelompok tani, serta rumah tangga penerima manfaat program. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program dan kondisi ketahanan pangan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, profil desa, serta berbagai literatur yang relevan dengan ketahanan pangan dan implementasi kebijakan publik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan Program Cadangan Pangan Pemerintah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check kepada informan. Selanjutnya, analisis implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan yang menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi program dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.



Gambar 1 Kerangka Pikir Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Kerangka pikir pada Gambar 1 menggambarkan alur penelitian yang berfokus pada implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Penelitian ini diawali dengan konteks program sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan masyarakat. Selanjutnya, implementasi program dianalisis menggunakan model Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, yang tercermin melalui kegiatan penyediaan dan distribusi cadangan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, monitoring dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Implementasi yang berjalan efektif diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga yang ditunjukkan melalui terpenuhinya ketersediaan pangan, kemudahan akses pangan, pemanfaatan

pangan yang optimal, dan stabilitas pangan. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga, berkurangnya kerawanan pangan, serta terwujudnya kemandirian pangan masyarakat di tingkat rumah tangga.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Tompo tergolong cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tompo, Bapak Suardi B., diketahui bahwa masyarakat memahami program tersebut sebagai bentuk bantuan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan bagi kelompok masyarakat yang masih tergolong rentan secara ekonomi. Narasumber menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat mengalami penurunan dari 279 penerima menjadi 174 penerima karena kondisi ekonomi dan produksi pertanian masyarakat mengalami peningkatan. Menurutnya, peningkatan hasil pertanian serta membaiknya harga gabah menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa bantuan pangan bukan merupakan program yang bersifat permanen, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi penerima. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap efektivitas implementasi program karena masyarakat dapat menerima proses penyesuaian data penerima secara lebih rasional dan objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Tompo dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah desa, ketua RT, kepala dusun, serta unsur masyarakat lainnya. Pendataan tidak hanya berpedoman pada data administratif yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah desa. Kepala Desa Tompo menjelaskan bahwa perubahan jumlah penerima bantuan dari 279 orang menjadi 174 orang merupakan hasil verifikasi dan penyesuaian data berdasarkan kondisi aktual masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan akibat membaiknya produksi pertanian dan harga gabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan kondisi masyarakat. Namun demikian, proses pembaruan data sering kali

menimbulkan pertanyaan dari warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat.

Aspek komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan data penerima, mekanisme penyaluran bantuan, serta tujuan program. Meskipun demikian, masih ditemukan sebagian masyarakat yang menganggap penghapusan nama mereka dari daftar penerima sebagai keputusan pemerintah desa. Kepala Desa Tompo menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pembaruan data yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi berjenjang. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memberikan penjelasan secara langsung kepada warga yang merasa keberatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan meminimalkan konflik sosial yang muncul akibat perubahan data penerima manfaat.

Pelaksanaan Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo juga didukung oleh koordinasi yang cukup baik antara pemerintah desa dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tompo, koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal. Bentuk koordinasi formal dilakukan melalui surat menyurat terkait verifikasi data dan permintaan informasi penerima manfaat, sedangkan koordinasi informal dilakukan melalui komunikasi langsung dan musyawarah bersama. Selain melibatkan pemerintah desa dan dinas terkait, proses koordinasi juga melibatkan RT, BPD, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam pembahasan dan klarifikasi data penerima bantuan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program. Dengan adanya koordinasi yang efektif, proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga, khususnya bagi keluarga yang tergolong kurang mampu. Bantuan pangan yang diterima masyarakat mampu membantu memenuhi

kebutuhan pangan sehari-hari dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Menurut Kepala Desa Tompo, manfaat program sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, meskipun jumlah penerima di desa tersebut relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan. Bantuan pangan yang diberikan menjadi sumber cadangan pangan tambahan yang dapat dimanfaatkan ketika pendapatan rumah tangga mengalami penurunan atau saat harga kebutuhan pokok meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan program memiliki fungsi perlindungan sosial yang cukup penting dalam menjaga stabilitas konsumsi pangan rumah tangga rentan di Desa Tompo.

Pengalaman penerima manfaat menunjukkan bahwa program bantuan pangan dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu penerima manfaat, Bapak Kahar, menjelaskan bahwa informasi mengenai status penerimaan bantuan diperoleh langsung dari aparat desa yang menyampaikan pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan yang diterima memberikan rasa aman karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan. Meskipun jumlah bantuan yang diterima tidak selalu besar, keberadaan bantuan tetap dianggap berarti dan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah tidak hanya memberikan manfaat material berupa pangan, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepastian bagi keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo tidak menghadapi kendala teknis yang berarti. Namun demikian, beberapa penerima manfaat mengungkapkan adanya hambatan berupa antrean yang cukup panjang pada saat pengambilan bantuan. Kondisi tersebut terjadi karena banyak warga datang pada waktu yang bersamaan untuk menerima bantuan pangan. Meskipun demikian, penerima manfaat menilai bahwa petugas telah mampu mengatur proses penyaluran dengan baik sehingga kegiatan tetap berlangsung tertib dan lancar. Hambatan tersebut tidak sampai mengganggu efektivitas program secara keseluruhan, melainkan hanya berpengaruh pada kenyamanan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang diterapkan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan melalui pengaturan jadwal distribusi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat pada umumnya menilai penyaluran bantuan CPP telah dilakukan secara cukup adil dan tepat sasaran. Ketua RT menyampaikan bahwa bantuan memang diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak mampu sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan tersebut. Kebijakan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Ketepatan sasaran ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program karena dapat meminimalkan kecemburuan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Meskipun masih terdapat beberapa warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdata, secara umum masyarakat memahami bahwa program memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat.

Peran ketua RT dalam implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah terbukti cukup strategis. Ketua RT tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam proses verifikasi data, pengawasan distribusi bantuan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tingkat masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara RT dan pemerintah desa berjalan dengan baik melalui keterlibatan aktif dalam rapat, musyawarah, dan kegiatan distribusi bantuan. Hubungan yang harmonis tersebut memudahkan proses komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga informasi terkait program dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Keterlibatan RT juga membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan berhak memperoleh manfaat program.

Masyarakat penerima manfaat memiliki harapan besar agar Program Cadangan Pangan Pemerintah tetap dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang. Menurut Bapak Kahar sebagai penerima manfaat, program ini memberikan dampak yang nyata terhadap pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sehingga keberlanjutannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, penerima manfaat juga menginginkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan agar manfaat yang diterima menjadi lebih optimal. Harapan tersebut menunjukkan bahwa program telah memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat dan dianggap relevan dengan kebutuhan mereka. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial dan

penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Desa Tompo, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan pangan.

➤ Pembahasan

Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Tompo menunjukkan bahwa aspek komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tujuan program, mekanisme penyaluran, serta perubahan data penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menempatkan komunikasi sebagai faktor utama dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh kelompok sasaran. Komunikasi yang jelas dan konsisten mampu mengurangi kesalahpahaman masyarakat terkait perubahan jumlah penerima bantuan yang terjadi akibat proses verifikasi data. Dengan demikian, efektivitas komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo didukung oleh keterlibatan pemerintah desa, ketua RT, kepala dusun, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program. Temuan ini mendukung pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki pelaksana program. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses distribusi masih menghadapi kendala berupa antrean panjang pada saat penyaluran bantuan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas manajemen distribusi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Aspek disposisi atau sikap pelaksana juga terlihat cukup baik dalam implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo. Pemerintah desa dan perangkat terkait

menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini terlihat dari proses verifikasi data yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Sikap pelaksana yang mendukung tujuan program berkontribusi terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya disposisi yang positif, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Struktur birokrasi yang diterapkan dalam Program Cadangan Pangan Pemerintah juga menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, Dinas Ketahanan Pangan, RT, BPD, dan unsur masyarakat lainnya dalam proses pendataan hingga distribusi bantuan. Struktur birokrasi yang jelas memungkinkan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga mengurangi potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan. Temuan ini mendukung pandangan Edward III bahwa struktur birokrasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas implementasi kebijakan melalui pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terarah. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan pangan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola dan mengoordinasikan seluruh tahapan program secara sistematis.

Secara keseluruhan, implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tompo memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga masyarakat. Bantuan pangan yang diberikan mampu membantu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama pada saat kondisi ekonomi mengalami tekanan atau terjadi kenaikan harga bahan pokok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena

itu, keberlanjutan program perlu terus didukung melalui peningkatan kualitas pendataan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi partisipasi masyarakat agar manfaat.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru terbukti berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan melalui peningkatan akses pangan bagi kelompok rentan dan pengurangan beban pengeluaran keluarga. Implementasi program ini didukung oleh koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait serta mekanisme musyawarah dalam penetapan penerima manfaat, namun masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan data penerima, perubahan jumlah penerima manfaat, dan keterbatasan komunikasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas CPP sangat dipengaruhi oleh akurasi data, kualitas koordinasi kelembagaan, dan komunikasi publik yang baik.

➤ Saran

Diperlukan penguatan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi serta pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran program CPP. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi lintas lembaga serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan program, disertai evaluasi berkala yang melibatkan partisipasi masyarakat agar implementasi CPP semakin efektif dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. (2023). *Laporan ketahanan pangan nasional*. <https://bapanas.go.id>
- Food and Agriculture Organization. (2021). *The state of food security and nutrition in the world 2021*. <https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/>

- Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, World Food Programme, & World Health Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of implementation*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/implementing-public-policy/book239683>
- HLPE. (2020). *Food security and nutrition: Building a global narrative towards 2030*. Committee on World Food Security. <http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- Maxwell, D., & Smith, M. (2019). Household food security measurement and interpretation. *Food Policy*, 89, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101762>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>
- Saliem, H. P. (2020). Kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(1), 1–15. <https://doi.org/10.21082/fae.v38n1.2020.1-15>
- Suryana, A. (2021). Cadangan pangan pemerintah dan stabilitas sistem pangan nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 87–102. <https://doi.org/10.21082/akp.v19n2.2021.87-102>
- World Bank. (2022). *Food security update*. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update>